

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NO. 9 TAHUN  
2014 DALAM PENATAAN DAN PENYEDIAAN RUANG BAGI  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA  
(Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Kedungdoro Surabaya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

**DENNISIA GALANG BRAMANA**  
NPM : 1641010028

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN**  
**PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA**

Disusun Oleh :

**DENNISIA GALANG BRAMANA**

**NPM : 1641010028**

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

Menyetujui,

Pembimbing



**Dr. Agus Widiyarta, M.Si**  
**NIP.371089500451**

Mengetahui,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



**DR. Drs. Ee. Gendit Sukarno, MS, CHRA**  
**NIP. 195907011987031001**



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN**  
**PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA**  
**(Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang**  
**Jalan Kedungdoro Surabaya)**

Disusun Oleh :

**DENNISIA GALANG BRAMANA**

**NPM: 1641010028**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada Tanggal 23  
Juli 2021

PEMBIMBING

  
**Dr. AGUS WIDIYARTA, M.Si**  
**NIP. 371089500451**

Menyetujui

TIM PENGUJI

1. Ketua

  
**Dr. DIANA HERTATI, M.Si**  
**NPT. 196601031989032001**


2. Sekretaris

  
**Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si**  
**NIP.196902101993032001**

3. Anggota

  
**Dr. AGUS WIDIYARTA, M.Si**  
**NIP. 371089500451**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

  
**Dr. Drs. Ec. GENDUT SUKARNO, MS, CHRA**  
**NIP. 195907011987031001**



**LEMBAR REVISI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA  
(Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang  
Jalan Kedungdoro Surabaya)**

Disusun Oleh :

**DENNISIA GALANG BRAMANA**  
NPM: 1641010028

Telah direvisi dan disahkan pada tanggal 02 Agustus 2021

Tim Penguji 1

Tim Penguji 2

Tim Penguji 3



**Dr. Diana Hertati, M.Si**  
NIP.196601031989032001



**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
NIP.196902101993032001



**Dr. Agus Widivarta M.Si**  
NIP. 371089500451

# **IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NO. 9 TAHUN 2014 DALAM PENATAAN DAN PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA**

**(Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Kedungdoro  
Surabaya)**

## **Dennisia Galang Bramana**

Jumlah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kedungdoro, Surabaya di ruas-ruas jalan protokol tersebut, membuat Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan upaya-upaya penertiban pada tiap jalan protokol. Secara terminologi penertiban ini bermakna penggusuran secara permanen ataupun relokasi. Seringkali tindakan ini diwarnai dengan konflik antara pihak penertib maupun pedagang kaki lima (PKL). Fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah Pedagang Kaki Lima di kawasan jalan Kedungdoro, Surabaya dan hal ini tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah, satpol PP dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengambilan data primer melalui wawancara in depth interview serta observasi dari informan terkait.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1. faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut : a. Pihak pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan mengakui bahwa tidak tersedia lahan di lokasi dan jumlah PKL terlalu banyak, kemudian, penertiban, sebagai langkah terakhir jika PKL tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan. 2. Disposisi, bahwa pelaksana memiliki pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan tersebut serta tugas masing-masing dan memiliki preferensi nilai yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi lingkungan eksternal mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan yaitu dengan lingkungan sosial masyarakat yang kondusif. 3. Komunikasi, pemerintah kota Surabaya Dan Dinas Koperasi dan UMKM mengikutsertakan masyarakat dengan mengundang perwakilan dari para pedagang kaki lima seperti ketua-ketua paguyuban pedagang kaki lima. 5. Struktur Birokrasi, Standar kebijakan dan sasaran kebijakan dalam implementasi penataan dan pembinaan PKL sesuai dengan Kota Surabaya No.9 Tahun 2014 dapat dikatakan masih kurang memadai.

***Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penataan dan Penyediaan Ruang,  
Pedagang Kaki Lima (PKL)***

## **ABSTRACT**

### ***IMPLEMENTATION OF SURABAYA CITY PERDA NO. 9 YEAR 2014 IN ARRANGEMENT AND PROVISION OF SPACE FOR STANDARD TRADERS IN THE CITY OF SURABAYA***

(Study on Street Vendors along Jalan Kedungdoro Surabaya)

**Dennisia Galang Bramana**

The number of street vendors (PKL) in the Kedungdoro area, Surabaya on the protocol roads, makes the Surabaya City Government have to make efforts to control each protocol road. In terms of control, this means permanent eviction or relocation. Often this action is colored by conflicts between the parties in order and street vendors (PKL). The phenomenon that has been seen, of course, has become the duty of all components of society to think more deeply about the problem of street vendors in the Kedungdoro street area, Surabaya and this cannot be separated from the role of the local government, Satpol PP and the Cooperatives and SMEs Service of Surabaya City.

This research method is descriptive qualitative with primary data collection through in-depth interviews and observations from relevant informants. Based on the results of the study that: 1. the factors that influence the success of the implementation of the policy are as follows: a. The policy makers and implementers in the field admit that there is no land available at the location and the number of street vendors is too much, then, controlling, as a last step if street vendors continue to refuse to participate in the arrangement program. 2. Disposition, that the implementer has a good understanding of the implementation of the policy and their respective duties and has a preference for values used in the implementation of the policy. External environmental conditions affect the implementation of structuring policies, namely with a conducive social environment. 3. Communication, the Surabaya city government and the Cooperatives and MSMEs Service involve the community by inviting representatives from street vendors such as the heads of street vendors' associations. 5. Bureaucratic structure, policy standards and policy targets in the implementation of structuring and fostering street vendors in accordance with the City of Surabaya No. 9 of 2014 can be said to be still inadequate.

***Keywords: Policy Implementation, Spatial Planning and Provision, Street Vendors (PKL)***

## **KATA PENGANTAR**

Puji Tuhan kepada Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kehadiran Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA NO. 9 TAHUN 2014 DALAM PENATAAN DAN PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA**

**(Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Kedungdoro Surabaya)**

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus Widiyarta, S.SOS, M.SI selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis, serta semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ertien Rining N, M.Si selaku koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur serta Dosen Pembimbing penulis.
4. Ibu Ina Rahmawati P, ST selaku Plt Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha mikro yang telah memberi informasi seputar Dinas Koperasi dan usaha Mikro.
5. Kedua orang tua Dr. Bambang Jatmiko M.M dan Drs. Dyah Hastuti M,Si penulis yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi penulis agar cepat menyelesaikan Skripsi penelitian.
6. Sahabat Tercinta penulis Kezia liziana dan Anindita Hidayat yang mensupport penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini.

7. Sahabat penulis Dalbo, Ecky Dwi, Tegar Anugerah, Syahrul Fitroni, Biyan Ady, Bahari Cukong, Dicky Armand, M. Taqiyuddin, Budi Copet, Asif Rachman, Faras rasyid baswedan, Risky Cireng , Lala Tri, Rizal arab, Priantina Ocatvia, Yusrina, Kharisma Dinda, Rafi keket, Andre Presma UPN yang membantu mentoring penulis dalam menyusun Skripsi penelitian.
8. Seluruh Kawan Sejawat Partai Solid Administrasi Publik angkatan 2016 yang sama sama sedang berjuang dan saling support dalam menyelesaikan Skripsi penelitian.

Akhirnya penulis dapat berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan laporan ini.

Surabaya, Juli 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Kegunaan Penelitian .....	12

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1. Penelitian Terdahulu .....	14
2.2. Landasan Teori .....	19
2.2.1. Kebijakan Publik .....	19
2.2.1.1. Kebijakan Publik Dalam Efektivitas .....	21
2.2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik .....	23
2.2.2. Implementasi .....	24
2.2.2.1. Pengertian Implementasi .....	24
2.2.2.2. Model Implementasi .....	25
2.2.2.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi.....	29
2.2.3. Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	31
2.2.3.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	31
2.2.3.2. Jenis-jenis Dan Tempat Usaha .....	33

2.2.3.3. Hak-hak Pedagang Kaki Lima .....	34
2.2.4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 .....	34
2.3. Kerangka Berpikir .....	41

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	55
4.1.1. Gambaran Umum Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya .....	55
4.1.2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.....	56
4.1.3. Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.....	58
4.1.4. Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Kedungdoro Surabaya .....	59
4.2. Hasil Penelitian.....	61
4.2.1. Sumber Daya Manusia.....	62
4.2.2. Komunikasi .....	68
4.2.3. Disposisi .....	73
4.2.4. Struktur Birokrasi .....	76
4.3. Pembahasan.....	82
4.3.1. Kesiapan Sumber Daya .....	82
4.3.2. Komunikasi .....	83
4.3.3. Disposisi .....	85
4.3.4. Struktur Birokrasi .....	86

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran .....	91

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Data Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kedungdoro, Surabaya Tahun 2019 .....	10
Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang .....	17
Tabel 4.2. Data Pedagang kaki lima (PKL) Dikawasan Kedungdoro, Surabaya.....	61
Tabel 4.1. Hasil Rangkuman Penelitian .....	87



## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1 Kerangka Berfikir .....	42
Gambar 3.1. Model Interaktif menurut Miles dan Huberman .....	52
Gambar 4.1. Sosialisasi dan Penyuluhan Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya Pada PKL Binaan Kedungdoro, Surabaya, Tahun 2021 .....	72
Gambar 4.2. Sosialisasi dan Penyuluhan Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya Pada PKL Binaan Kedungdoro, Surabaya, Tahun 2021 .....	72
Gambar 4.3. SOP Sosialisasi dan Penyuluhan Pedagang Kaki Lima Tahun 2020-2021 .....	81